

**Revitalisasi Pendidikan Politik Masyarakat dalam Menggerus Praktik
Money Politic di Desa Panyirapan
Kabupaten Serang menjelang Pilkada 2024**

Muhammad Akbar Maulana¹, Nita Aribah Hanif^{2,*}
^{1,2} Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang

***dosen03015@unpam.ac.id**

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) bertajuk ‘*Revitalisasi Pendidikan Politik Masyarakat dalam Menggerus Praktik Money Politic di Desa Panyirapan Kabupaten Serang Menjelang Pilkada 2024*’, dilatarbelakangi oleh tingginya praktik politik uang di Wilayah Provinsi Banten, tidak terkecuali Desa Panyirapan. Tujuan kegiatan ini sesuai dengan temanya guna meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat terhadap penentuan pilihan kandidat pada kontestasi pemilu maupun pilkada terlepas dari praktik politik uang yang terjadi. Metode yang dilakukan yakni melalui penyampaian materi secara teori maupun praktik untuk menakar efektivitas sosialisasi terhadap peningkatan preferensi masyarakat terhadap politik uang dalam penyelenggaraan pilkada. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi dapat berjalan dengan lancar dan diikuti oleh masyarakat dengan antusias. Antusiasme ini ditunjukkan dengan kehadiran dan interaktivitas masyarakat Desa Panyirapan selama proses diskusi dan berpartisipasi aktif dalam mempraktikkan materi yang telah disampaikan melalui media yang tersedia. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran politik bagi masyarakat serta meminimalisir terjadinya praktik politik uang yang dibudayakan oleh kandidat sebagai strategi kemenangan. Adapun output lain dari kegiatan ini yakni penyusunan dokumen rekomendasi terkait strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi praktik politik uang menjelang pesta demokrasi setingkat pemilu maupun pilkada

Kata Kunci: *Money Politics*, Pendidikan Politik, Pilkada 2024, Revitalisasi

ABSTRACT

The community service activity entitled "Revitalizing Community Political Education in Eradicating Money Political Practices in Panyirapan Village, Serang Regency Ahead of the 2024 Regional Elections", was motivated by the high level of money political practices in the Banten Province Region, including Panyirapan Village. The aim of this activity is by its theme to increase public education and political awareness regarding the determination of candidate choices in election contests and regional elections regardless of the money politics practices that occur. The method used is through the delivery of theoretical and practical material to measure the effectiveness of socialization on increasing people's preferences for money politics in the implementation of regional elections. The results of this activity show that the socialization process can run smoothly and the community will participate enthusiastically. This enthusiasm is shown by the presence and interactivity of the Panyirapan Village community during the discussion process and active participation in practicing the material that has been presented through the available media. It is hoped that this activity can increase political awareness among the public and minimize the practice of money politics which candidates cultivate as a winning strategy. Another output from this activity is the preparation of a recommendation document regarding strategies that the government must carry out to reduce the practice of money politics ahead of democratic parties at the election and regional elections.

Keywords: *Head Local Election in 2024, Money Politics, Political Education, Revitalization*

PENDAHULUAN

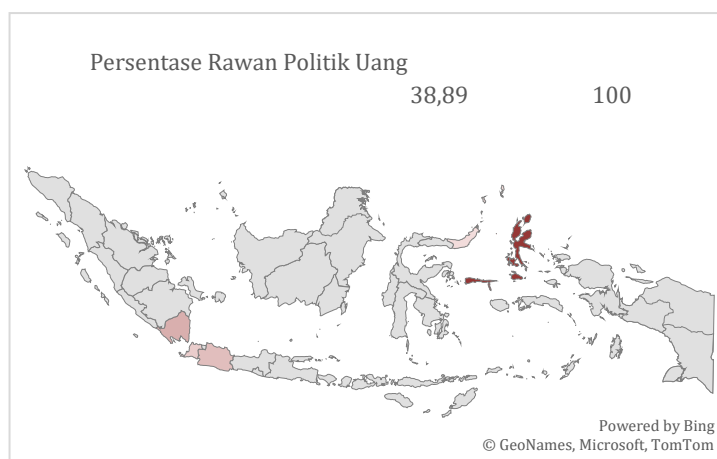
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi dalam pengimplementasian kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu dapat menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan kearah kehidupan yang lebih baik dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan meliputi pembuatan kebijakan, mengontrol pelaksanaan kebijakan, ataupun memilih pemimpin pemerintahan.

Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta dalam pemerintahan dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Inti dari demokrasi ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan yang demokratis hingga saat ini masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. Setiap warga negara pada dasarnya tidak ada pembedaan atas hak dan kewajibannya dalam kehidupan social dan juga bernegara, semuanya sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah hak untuk memilih maupun dipilih, hak berpendapat dan hak tergabung dalam partai politik, serta hak untuk ikutserta dalam tahapan kampanye menjelang pemilu maupun pilkada.

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah diimplementasikan sebagian negara di dunia, termasuk Indonesia, sejak awal kemerdekaan bangsa ini. Meskipun proses demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya terealisasi dengan sempurna karena Indonesia masih menghadapi problematika klasik seperti praktik politik uang atau yang kerap disebut *money politic*. Berdasarkan studi dari *The Latin America Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer*, terkait *Money Politic Project of South East Asia* menunjukkan bahwa Indonesia menduduki urutan ketiga di dunia sebagai negara dengan praktik politik uang tertinggi (Pahlevi & Amrullohi, 2020).

Temuan ini diperkuat dengan hasil survei Populi Center yang dilakukan secara serentak pada pra-pemilu 2024 dalam laporan *Starting Point: Posisi Elektorial Jelang Kampanye Pemilu 2024* yang merepresentasikan sebanyak 37,2% responden mengkhawatirkan praktik politik uang (Populicenter.org, 2023). Fenomena tersebut merepresentasikan tingginya praktik politik uang dalam pesta demokrasi di Indonesia yang telah menjadi budaya setiap periodik. Bahkan 46,9% responden menganggap budaya politik uang di Indonesia sebagai hal wajar dan dapat diterima oleh masyarakat (indikator.co.id, 2024).

Pemakluman masyarakat terkait politik uang di Indonesia tidak terlepas dari praktik yang dilakukan saat pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Provinsi Banten dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan praktik politik uang tertinggi di Indonesia urutan keempat berdasarkan survei Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia pada tahun 2023.



Gambar 1. Provinsi dengan Tingkat Kerawanan Politik Uang Tertinggi

Sumber: (Tumpal, 2023)

Gambar 1 merepresentasikan data beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki urgensi problematika politik uang meliputi Maluku Utara (100%), Lampung (55,56%), Jawa Barat (50%), Banten (44,44%) dan Sulawesi Utara (38,89%). Tingginya tingkat kerawanan politik uang di Provinsi Banten juga dipengaruhi oleh tingkat toleransi masyarakat terhadap politik uang sebesar 54,5% pada survei Tahun 2022 dan meningkat menjadi 58,2% pada survei 2024, yang merupakan persentase tertinggi di Indonesia dibandingkan provinsi lain (Amal, 2022). Buntut dari praktik politik uang tersebut ditemukan sebanyak 38,1% masyarakat Provinsi Banten akan memilih kandidat pemberi imbalan uang dan 8,5% memilih kandidat berdasarkan perbandingan jumlah uang terbanyak yang diterimanya. Meskipun di sisi lain terdapat masyarakat yang mengutamakan hati nurani dalam menentukan pilihan kandidat disamping imbalan yang diterima sebesar 49,1% (indikator.co.id, 2024).

Politik uang menurut Bumke (2021) dikategorikan dalam tiga dimensi berupa *vote buying*, *vote broker* dan korupsi politik yang ketiganya menasar pada masyarakat terutama menengah ke bawah untuk mempengaruhi keputusan pilihannya dalam pemungutan suara sebagai strategi persaingan dengan lawan politik. Politik uang dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang sebagai media hutang budi yang akan dirasakan oleh penerimanya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang mendefinisikan politik uang dengan frasa “pemberian uang dan materi lainnya” guna membeli suara dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Budaya politik uanglah yang memberi kesan mahalnya biaya politik dan untuk memenangkan kursi sebagai pejabat publik membutuhkan sokongan dana dari pihak eksternal, salah satunya pengusaha.

Budaya politik uang menempatkan keberhasilan kandidat terpilih dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin sebagai ajang balas budi pada donatur atau yang disebut *investive corruption*. Hal ini bertolakbelakang dengan tujuan pembangunan politik yang mengharuskan proses pengisian jabatan berdasarkan kompetensi bukan kekuatan modal politik dalam bentuk uang atau material (Nurjulaiha et al., 2022). Adapun dampak jangka panjang dari kepemimpinan daerah hasil dari politik uang yakni rendahnya kualitas kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan semakin melenggangnya

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

pemerintahan yang korup (Abdurrohman, 2021). Pernyataan ini dibuktikan dengan tingginya kasus korupsi di Provinsi Banten yang dilakukan oleh aktor pemerintah baik dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota yang dipicu oleh permainan oknum untuk menunjang sisi egosentris dan oportunistiknya (Loka Data, 2017).

Terdapat beberapa faktor penyebab suburnya praktik politik uang yakni tekanan ekonomi, apatis terhadap politik dan rendahnya pendidikan politik masyarakat (Abdiellah et al., 2022; Pradhanawati et al., 2019 ; Solihah & Triono, 2022). Oleh karena itu dibutuhkan peran *stakeholder* dalam mengisi kesenjangan kondisi masyarakat untuk meminimalisir praktik politik uang, salah satunya melalui peningkatan pendidikan politik masyarakat. Problematika politik praktis yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Banten memantik penulis untuk mengambil andil dalam upaya peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui sosialisasi sebagai salah satu rangkaian proyek pengabdian kepada masyarakat. Urgensi pendidikan politik bagi masyarakat di Provinsi Banten sangat dibutuhkan menimbang dekatnya tahun politik 2024 pada ajang kontestasi pilkada serentak tepatnya 27 November 2024 mendatang.

Kegiatan sosialisasi akan dilakukan tepatnya di Desa Panyirapan, Banten karena politik uang di Desa Panyirapan bukanlah fenomena baru. Revitalisasi pendidikan politik di Desa Panyirapan sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk menekan praktik politik uang. Pendidikan politik bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat, dari yang cenderung apatis dan pragmatis menjadi lebih kritis dan idealis dalam memilih pemimpin. Program pendidikan politik yang tepat sasaran dan berkesinambungan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa suara mereka adalah hak yang harus digunakan dengan bijak, bukan untuk diperjualbelikan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang program pendidikan politik yang lebih efektif dan efisien, khususnya di daerah-daerah dengan masalah politik uang yang serupa dengan Desa Panyirapan.

Kegiatan ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembangunan politik yang lebih sehat dan berintegritas di tingkat lokal. Adapun tujuan utama kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya andil mereka dalam pemilihan kepala daerah yang berpengaruh pada pembangunan daerah lima tahun mendatang. Hal inilah yang memacu pentingnya estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh kepala daerah dengan visi misi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Provinsi Desa Panyirapan. Pendidikan politik diharapkan mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap politik uang, dari yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari proses politik yang wajar menjadi sesuatu yang harus ditolak karena merusak tatanan demokrasi.

METODE

Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah pembelajaran dengan menyampaikan teori mengenai partisipasi politik dalam menggunakan haknya dalam memilih, serta simulasi tentang pelaksanaan dari proses Pilkada Serentak 2024. Target kegiatan PKM ini adalah masyarakat di Desa Panyirapan Kp Panyirapan Wetan Rt.005 Rw. 002 Ds. Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Beserta Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pamulang Kampus Serang. Kegiatan ini direncanakan akan diikuti oleh sekitar 100 orang peserta yang juga berkategori sebagai Pemilih

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

dalam Pilkada 2024. Materi yang diberikan adalah pentingnya konsep pilkada pada level teori dan praktik lapangan. Dalam pemaparan materi, tim PKM memberikan penjelasan mengenai tema kegiatan, yaitu “Revitalisasi Pendidikan Politik untuk Menggerus Praktik Money Politic di Desa Panyirapan Tahun 2024”.

Sosialisasi dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat dan pemuda ini ditujukan agar masyarakat kembali memiliki antusiasme, memahami prerefensi politiknya dan juga diharapkan partisipasi politik masyarakat ini bersifat otonom. Sehingga, semakin otonomnya seseorang dalam partisipasi politiknya maka akan semakin tinggi pemahaman pentingnya dirinya sebagai individu untuk bangsa, dan negaranya, juga diharapkan tingginya pemahaman dirinya dalam mencermati proses dan kegiatan politik. Selanjutnya, tim Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan simulasi lapangan. Dalam tahapan ini, peserta diminta untuk melakukan simulasi implementasi dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang mana masyarakat memilih surat suara Pilkada 2024 dan mendapatkan pemahaman yang baik dalam rangkaian proses Pilkada untuk berperanaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Politik di Desa Panyirapan

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengenai implementasi program revitalisasi pendidikan politik di Desa Panyirapan, menunjukkan dampak signifikan dalam mengurangi praktik politik uang. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik yang jujur dan transparan. Melalui serangkaian kegiatan seperti pelatihan, diskusi publik, dan sosialisasi, warga desa diberikan pemahaman lebih mendalam tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan mengungkapkan bahwa partisipasi aktif dalam forum-forum masyarakat telah memperkuat komitmen setiap warga masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi, serta mendorong untuk menolak tawaran politik yang merugikan. Selain itu, adanya kerjasama antara pemerintah desa dan organisasi masyarakat sipil juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pendidikan politik yang berkelanjutan. Dengan demikian, program revitalisasi ini tidak hanya berhasil mendidik masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menanggulangi praktik politik uang yang sering kali mengganggu proses demokrasi di tingkat lokal.

Program pendidikan politik kepada masyarakat ini diluncurkan sebagai respons terhadap tingginya angka korupsi dan rendahnya partisipasi politik masyarakat, yang sering kali dipengaruhi oleh tawaran politik uang. Melalui serangkaian kegiatan seperti pelatihan keterampilan kepemimpinan, diskusi publik, dan sosialisasi mengenai hak-hak pemilih, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam pemilu. Salah satu temuan menarik dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif politik uang. Sebelumnya, banyak warga yang melihat praktik tersebut sebagai hal yang lumrah dan tak terhindarkan. Namun, setelah mengikuti program pendidikan politik, masyarakat belajar untuk mengidentifikasi dan menolak tawaran yang merugikan. Misalnya, dalam forum-forum diskusi yang diadakan, banyak peserta masyarakat yang berbagi pengalaman pribadi mengenai tawaran uang atau barang dari calon pemimpin saat pilkada, dan bagaimana masyarakat

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

merasa tertekan untuk menerimanya. Edukasi semacam ini tidak hanya membuat masyarakat lebih sadar, tetapi juga membangun solidaritas di antara warga masyarakat untuk saling mendukung dalam menolak praktik tersebut.

Kerjasama antara pemerintah desa dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemuda di Desa Panyirapan, program pendidikan politik bagi masyarakat ini mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan yang inklusif dilakukan untuk menciptakan ruang dialog yang aman, di mana setiap warga dapat berbagi pandangan dan mencari solusi bersama untuk permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong munculnya inisiatif lokal dalam memantau jalannya pemilu, sehingga masyarakat merasa memiliki kendali lebih besar atas proses demokrasi di tingkat lokal khususnya di Desa Panyirapan.

Program revitalisasi pendidikan politik di Desa Panyirapan tidak hanya berhasil mendidik masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menanggulangi praktik politik uang yang merusak. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, diharapkan desa ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam menciptakan budaya politik yang lebih bersih dan demokratis. Upaya ini menggambarkan harapan baru bagi masa depan politik di tingkat lokal, di mana setiap suara dihargai dan setiap pilihan diambil dengan pertimbangan yang matang, bukan karena iming-iming materi.

Revitalisasi pendidikan politik di Desa Panyirapan dirancang untuk memastikan keberlanjutan meskipun pelatihan telah selesai, dengan mengimplementasikan berbagai strategi yang mendukung kontinuitas dan pengembangan komunitas. Salah satu langkah penting adalah pembentukan jaringan atau komunitas yang fokus pada pendidikan politik, di mana peserta dapat saling mendukung dalam diskusi, berbagi informasi, dan melanjutkan kegiatan pendidikan secara mandiri. Dengan menciptakan wadah yang solid, anggota komunitas dapat terus memperkuat pemahaman mereka tentang isu-isu politik yang relevan. Selain itu, menawarkan pelatihan lanjutan secara berkala menjadi kunci untuk menjaga semangat dan pengetahuan peserta. Pelatihan ini dapat mencakup topik-topik baru atau isu terkini yang berhubungan dengan konteks politik lokal, sehingga peserta selalu mendapatkan informasi terbaru dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif.

Kegiatan rutin, seperti diskusi bulanan, seminar, atau forum terbuka, juga dapat diadakan untuk menjaga partisipasi masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk belajar lebih lanjut, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas. Selain itu, menjalin kolaborasi dengan lembaga lokal, seperti sekolah, organisasi non-pemerintah, atau pemerintah desa, dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam melanjutkan program. Lembaga-lembaga ini dapat membantu menyediakan sumber daya, pendanaan, atau tempat untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang berkelanjutan.

Pengembangan materi pendidikan yang telah ada juga menjadi penting untuk memastikan relevansi program ke depannya. Dengan menyimpan dan memperbarui bahan ajar secara berkala, peserta baru dapat dilibatkan, sementara peserta lama tetap mendapatkan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Melakukan evaluasi berkala terhadap program dan mengumpulkan umpan balik dari peserta akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

mendorong partisipasi karena warga merasa bahwa suara mereka dihargai dan diperhatikan.

Akhirnya, mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam program pendidikan bagi generasi muda di desa dapat menjadi langkah jangka panjang yang strategis. Dengan menjangkau anak-anak dan remaja, dasar kesadaran politik dapat ditanamkan sejak dini, sehingga menciptakan generasi yang lebih teredukasi dan aktif secara politik di masa depan. Dengan menerapkan berbagai strategi ini, program revitalisasi pendidikan politik di Desa Panyirapan diharapkan dapat berlanjut dan berkembang, sehingga meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, serta menciptakan komunitas yang lebih kuat dan berdaya dalam menghadapi tantangan politik di masa depan.

C. Keberhasilan (judul bebas, menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan)

Untuk mengukur keberhasilan program revitalisasi pendidikan politik di Desa Panyirapan, beberapa jenis data dapat digunakan, antara lain;

1) Survei Pra dan Pasca Program

Survei ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait politik uang sebelum dan setelah program dilaksanakan.

2) Tingkat Partisipasi Masyarakat

Data mengenai jumlah warga yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan politik, seperti pelatihan, diskusi, dan forum publik, dapat menjadi indikator keberhasilan.

3) Pengamatan dan Wawancara

Melakukan wawancara dengan peserta program, tokoh masyarakat, dan pengurus desa untuk mendapatkan perspektif tentang dampak program dan perubahan sikap warga terhadap politik uang.

4) Data Pemilu

Menganalisis data pemilu lokal, termasuk tingkat partisipasi pemilih dan laporan tentang praktik politik uang yang dilaporkan sebelum dan sesudah program.

5) Laporan Kegiatan

Dokumentasi aktivitas yang dilakukan selama program, termasuk jumlah dan jenis kegiatan, serta umpan balik dari peserta.

6) Indikator Sosial dan Ekonomi

Mengumpulkan data tentang perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, yang dapat menunjukkan dampak jangka panjang dari pengurangan praktik politik uang.

7) Tanya Jawab Fokus (Focus Group Discussion)

Mengadakan diskusi kelompok terfokus untuk menggali pengalaman dan persepsi masyarakat tentang perubahan yang terjadi akibat program.

Salah satu aspek menarik yang ditemukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah perubahan perilaku pemilih yang semakin kritis dan selektif oleh masyarakat

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

di Desa Panyirapan. Melalui pendidikan politik, warga desa belajar untuk menganalisis visi dan misi calon pemimpin, bukan sekadar terpengaruh oleh tawaran materi. Misalnya, dalam berbagai pertemuan, warga desa mulai membahas dan membandingkan program kerja calon pemimpin dengan lebih mendalam, bertanya tentang strategi mereka dalam menyelesaikan masalah lokal, serta menilai komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi konsumen suara, tetapi juga pelaku aktif dalam proses demokrasi, yang menciptakan dinamika baru dalam pemilu lokal.

Kolaborasi antara pemerintah Desa Panyirapan dan organisasi masyarakat sipil sangat terlihat karena telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan pendidikan politik. Inisiatif yang dilakukan ini tidak hanya terbatas pada sosialisasi, tetapi juga mencakup pembentukan kelompok pemantau pemilu yang terdiri dari warga setempat. Kelompok ini bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu, melaporkan praktik-praktik kecurangan, dan memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan adil. Pendekatan ini tidak hanya memberdayakan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri warga masyarakat dalam partisipasi di dalam proses politik.

Kolaborasi dengan lembaga lokal merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program revitalisasi pendidikan politik di Desa Panyirapan. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengidentifikasi lembaga-lembaga yang relevan, seperti sekolah, organisasi non-pemerintah (NGO), pemerintah desa, dan komunitas bisnis lokal. Masing-masing lembaga ini memiliki sumber daya, jaringan, dan keahlian yang berbeda, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pendidikan politik. Setelah lembaga yang tepat diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan program pendidikan secara bersama-sama, melibatkan diskusi untuk merumuskan tujuan bersama, menentukan materi yang akan diajarkan, dan merancang metode pengajaran yang sesuai. Kerja sama ini memastikan bahwa program tidak hanya relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendapatkan dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak.

Lembaga lokal juga dapat menyediakan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan program, seperti ruang kelas dari sekolah atau materi pelajaran dari NGO. Ini tidak hanya mengurangi biaya operasional program, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan politik. Selain itu, kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan jangkauan program, karena lembaga-lembaga tersebut biasanya memiliki jaringan yang sudah ada dalam komunitas. Dengan dukungan mereka, program dapat menarik lebih banyak peserta, termasuk mereka yang mungkin tidak terlibat sebelumnya. Melalui kolaborasi, lembaga lokal juga bisa meningkatkan kapasitas mereka sendiri dalam hal pendidikan politik; pelatihan yang diberikan kepada relawan atau staf dapat memperluas pengetahuan mereka dan meningkatkan kemampuan dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat.

Proses umpan balik dan evaluasi program juga dapat dimanfaatkan melalui keterlibatan lembaga lokal, yang dapat membantu mengumpulkan data dan masukan dari peserta serta memberikan perspektif yang berharga tentang efektivitas program. Ini akan sangat membantu dalam perbaikan berkelanjutan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh lagi, kolaborasi ini dapat mengarah pada pembangunan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan, di mana lembaga-lembaga ini bersama-sama merancang program-program baru dan memperluas inisiatif pendidikan. Selain itu, ketika menghadapi tantangan, lembaga-lembaga lokal dapat saling mendukung dengan berbagi solusi dan strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul. Dengan melibatkan lembaga lokal dalam program revitalisasi pendidikan politik,

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Desa Panyirapan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan efektivitas program, dan menciptakan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi program itu sendiri, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan solidaritas di dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk pengembangan politik yang sehat dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Revitalisasi pendidikan politik masyarakat di Desa Panyirapan, Kabupaten Serang, menjelang Pilkada 2024 merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk menggerus praktik *money politics* yang kerap merusak integritas proses demokrasi. Praktik semacam ini tidak hanya mengancam kualitas pemilihan, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Dengan menyelenggarakan pengabdian kepada Masyarakat bertemakan program pendidikan politik yang terstruktur dan partisipatif, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sehingga masyarakat lebih kritis dalam menilai calon pemimpin yang akan memimpin selama 1 periode kedepan atau masa kerja 5 tahun. Melalui pendidikan politik yang efektif, masyarakat akan mampu memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan politik yang diambil, termasuk dampak negatif dari *money politics*. Keterlibatan masyarakat dalam program ini adalah kunci untuk membangun kesadaran kolektif yang dapat menentang praktik-praktik yang tidak etis dalam pemilu. Selain itu, evaluasi program yang dilakukan secara berkala sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, termasuk peserta, tokoh masyarakat, dan organisasi pendukung, program pendidikan politik ini akan semakin relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiellah, M. A., Muharram, D. R., & Julianingsi, J. (2022). The Impact of Money Politic in the Local Elections in Indonesia. *Journal of Contemporary Local Politics*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.46507/jclp.v1i1.74>
- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2), 142–159.
- Amal, I. (2022). Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu di Provinsi Banten. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan Vol*, 14(3), 3. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/3824/2343>
- Bumke, D. (2021). *Local Power and Money Politic in Indonesia*. Leeds University.
- indikator.co.id. (2024). *Rilis Exit Poll Pemilu 2024: Basis Demografi dan Perilaku Pemilih*. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/02/Rilis-Exit-Poll-Pilpres-2024-Indikator.pdf>
- Loka Data. (2017). *Peta Sebaran Kasus Korupsi di Indonesia*. Loka Data. <https://berkas.lokadata.id/?chart=kasus-nilai-korupsi&provinsi=36>
- Nurjulaiha, S., Rafni, A., Pancasila dan Kewarganegaraan, P., Ilmu Sosial, F., Negeri Padang Jl Hamka, U., & Author, C. (2022). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Menurut Perspektif Teory Political Development (Studi Di Provinsi Jambi). *Indonesian Journal of Social Science Review*, 1(2), 90–99.

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

- Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Populicenter.org. (2023). *Starting Point: Posisi Elektoral Jelang Kampanye Pemilu 2024*. <https://populicenter.org/wp-content/uploads/2023/11/Rilis-Surnas-Populi-Center-Nov-2023.pdf>
- Pradhanawati, A., Tawakkal, G. T. I., & Garner, A. D. (2019). VOTING THEIR CONSCIENCE: POVERTY, EDUCATION, SOCIAL PRESSURE and VOTE BUYING in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 19(1), 19–38. <https://doi.org/10.1017/jea.2018.27>
- Solihah, R., & Triono, T. (2022). Political Economic Transactions in Political Contest: Relationship Between Poverty and Money Politics in Indonesia. *International Journal of Research in Community Services*, 3(3), 99–105. <https://doi.org/10.46336/ijrcs.v3i3.304>
- Tumpal, R. (2023). *Bawaslu Petakan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Soal Politik Uang, Lolly Ingatkan Upaya Pencegahan*. Bawaslu.Go.Id. <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-petakan-kerawanan-pemilu-dan-pemilihan-soal-politik-uang-lolly-ingatkan-upaya>